

# ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI BALI DENGAN INDIKATOR RASIO KEUANGAN SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2017-2022

G. N. Adi Mahesa<sup>1</sup>, I G.P. Banu Astawa<sup>2</sup>

<sup>1 2</sup>Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [adi.mahesa@undiksha.ac.id](mailto:adi.mahesa@undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [banu.astawa@undiksha.ac.id](mailto:banu.astawa@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan indikator pendapatan daerah dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2017-2022. Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini mempergunakan indikator rasio keuangan sebagai indikator kuantitatif dan didukung dengan mempergunakan data hasil wawancara sebagai indikator kualitatif untuk mempertegas hasil penelitian. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Bali untuk tahun anggaran 2017 – 2022 berdasarkan perspektif pendapatan daerah dengan hasil perindikator menunjukkan hasil yang beragam. Bahwa indikator pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif, derajat desentralisasi fiskal menunjukkan dalam kategori kurang, kemandirian daerah tergolong dalam kategori rendah dan ketergantungan daerah menunjukkan hasil sangat tinggi, efektivitas pendapatan daerah menunjukkan hasil yang tergolong dalam cukup efektif serta indikator efisiensi pendapatan daerah berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan hasil yang tergolong dalam kategori efisien. Kemudian berdasarkan perspektif belanja daerah pertumbuhan belanja daerah tergolong dalam pertumbuhan positif, realisasi belanja operasional dan belanja modal yang tergolong dalam asersi keserasian tergolong memiliki serapan belanja yang positif serta indikator efisiensi belanja tergolong dalam kategori efisien dalam realisasi belanja daerah. Sehingga melalui penelitian ini pemerintah daerah kabupaten dan kota diharapkan dapat mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan bekerjasama dengan bank persepsi untuk efisiensi perolehan pendapatan daerah. Kemudian untuk belanja daerah perlu dilakukan optimalisasi lebih lanjut dengan berpedoman terhadap hasil evaluasi sehingga sisa anggaran belanja tidak hanya diarahkan kepada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran periode berikutnya.

**Kata kunci:** Pendapatan, Belanja, Kinerja Keuangan.

## Abstract

The purpose of this research is to assess the financial performance of local governments based on the Local Government Financial Statements using indicators of regional revenue and regional expenditure for the 2017-2022 fiscal year. This research is classified as quantitative descriptive research with quantitative and qualitative approaches. Data analysis techniques in this study use financial ratio indicators as quantitative indicators and are supported by using interview data as qualitative indicators to reinforce research results. The financial performance of the Regency and City Governments of Bali Province for the 2017-2022 fiscal year is based on regional

revenue perspectives with the results of indicators showing mixed results. That the regional revenue growth indicator shows positive growth, the degree of fiscal decentralization shows in the less category, regional independence is classified in the low category and regional dependence shows very high results, the effectiveness of regional revenue shows results that are classified as quite effective and regional revenue efficiency indicators based on the calculation results show results that are classified as efficient. Then, based on the perspective of regional spending, regional expenditure growth is classified as positive growth, the realization of operational expenditure and capital expenditure which are classified as compatible assertions are classified as having positive expenditure absorption and expenditure efficiency indicators are classified as efficient in regional expenditure realization. So through this research, district and city governments are expected to strive to increase regional revenues through efforts to increase Regional Original Revenue and collaborate with perception banks for efficient regional revenue generation. Then for regional expenditures, further optimization needs to be carried out based on the evaluation results so that the remaining budget expenditures are not only directed to the Remaining Over Budget Financing for the next period.

**Keywords:** Revenue, Expenditure, Financial Performance.

## PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan atas aturan yang mengikat pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan terhadap daerahnya secara mandiri dan termasuk pada pengelolaan keuangan daerah secara mandiri, memberikan kualitas pelayanan hingga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan atas penggunaan dana publik, pemerintah diwajibkan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dengan melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pemerintah Pusat, 2014). Hal ini memerlukan suatu pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah proses dalam penilaian kinerja makro dan kinerja program/kegiatan serta pemberlakuan analisis keuangan indikator pendapatan dan belanja sebagai indikator didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

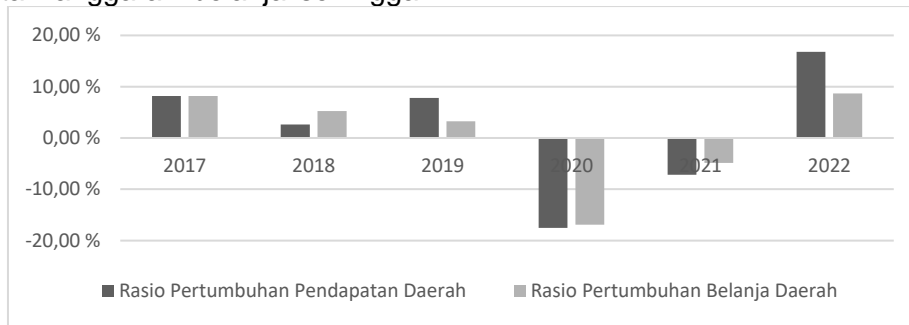
Pelaksanaan pengukuran kinerja keuangan ini didasari oleh pertanggungjawaban penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan *money follow function* merupakan alokasi anggaran program/kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap satuan unit kerja dan merupakan prinsip strategis guna menjaga penerapan atas efektivitas penggunaan dana milik masyarakat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu indikator keberhasilannya atas suatu output atas kinerja dari bidang keuangan atas dasar pendapatan daerah beserta belanja daerah dengan mempergunakan perhitungan indikator keuangan. (Mardiasmo, 2018) Bentuk pengukuran kinerja tersebut disajikan dalam bentuk rasio khusus yang dilakukan perhitungan dari unsur APBD dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bagian dari instrumen fiskal. (Nurul Amin, 2015). Dalam upaya penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan atas pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Laporan Kinerja Perwakilan Pemerintah (LAKIN) BPKP Provinsi Bali terdapat hanya 3 (tiga) pemerintah daerah yang dinyatakan akuntabel dengan perolehan nilai akuntabilitas BB dalam parameter penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu Provinsi Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan dibarengi dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Kemudian dilihat berdasarkan kemampuan pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah terjadi kondisi yang sangat berfluktuasi yakni pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungan (*trend*) meningkat atau kondisi menggambarkan selisih lebih realisasi pendapatan yang menguntungkan

(*favourable variance*). Untuk pertumbuhan belanja daerah pemerintah melakukan penghematan anggaran belanja sehingga

mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran.



Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Kemampuan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Bali Tahun 2017-2022

Sumber : Diolah dari Publikasi Laporan Realisasi Anggaran DJPK (2024)

Realisasi APBD untuk periode tahun 2017 hingga 2019 kecenderungan pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami peningkatan sementara untuk tahun 2020 dan 2021 realisasi APBD mengalami penurunan bahkan pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Namun, Tahun 2022 terjadi peningkatan yang tinggi terhadap pertumbuhan pendapatan beserta belanja daerah apabila dibandingkan dari tahun 2020 dan 2021. Dengan catatan khusus bahwa Tingkat realisasi nilai anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan kota Se-Provinsi Bali untuk tahun 2022 tercatat melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan diperlukan suatu proses analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota Se-Provinsi Bali dengan mempergunakan pendekatan rasio pendapatan dan belanja untuk tahun 2017 – 2022.

Dari fenomena di atas terdapat sinyal bahwa pemerintah memberikan sinyal yang positif terhadap perbaikan kondisi perekonomian daerah Provinsi Bali pasca pandemi kepada masyarakat selaku pemilik dana publik dan pemerintah telah menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini secara teoritis dijelaskan dengan Teori *Signaling*. *Signaler* yang merupakan pihak yang mempunyai keseluruhan dari informasi kemudian akan berusaha memberikan dan mengirimkan sinyal – sinyal, berupa sebuah informasi positif dalam upaya untuk memberikan sisi baik yang menjadi bagian organisasi kepada

*receiver* yang merupakan pihak ketiga sebagai pihak yang akan menerima informasi tersebut yang dalam hal ini adalah masyarakat/pengguna laporan keuangan. (Sutaryo & Tri Amanu, 2020) Adanya asimetri informasi yang terjadi, dari beberapa pihak yaitu antara pemerintah yang merupakan pihak internal dengan masyarakat sebagai pihak eksternal, dikarenakan masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai kondisi internal pemerintah. Sebagai bentuk pengurangan atas asimetri informasi tersebut dengan memberikan sinyal yang positif kepada masyarakat selaku pemangku kepentingan atas dana yang dimiliki. Bentuk penyampaian sinyal positif tersebut dilakukan Pemda dengan memberikan pengungkapan informasi melalui laman resmi yang dimiliki oleh masing – masing Pemda.

Penyampaian sinyal positif ini didukung oleh Teori Legitimasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik telah dilakukan secara berkesinambungan dan menerapkan kinerjanya secara transparansi serta akuntabel, sebagai bentuk kesinambungan kinerja (*going concern*). Legitimasi dari organisasi dapat dilihat sebagai suatu hal bahwa organisasi akan terus berjalan berdasarkan kepada nilai – nilai dari kemasyarakatan itu sendiri, kemudian atas teori ini menyarankan untuk suatu organisasi berusaha menumbuhkan dan memberikan keyakinan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan benar –

benar sesuai sebagaimana mestinya (Sutaryo & Tri Amanu, 2020).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mempergunakan metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan metode penelitian dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan Seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2016-2022 dari seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Bali. Sampel dalam penelitian ini perkalian antara 10 (sepuluh) indikator rasio keuangan, 9 (sembilan) kabupaten dan kota Se – Provinsi Bali dan 6 (enam) tahun periode analisis yang berjumlah 540 sampel.

Data dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder dan data primer. Data Sekunder merupakan APBD dan LRA yang diperoleh melalui website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara pada 3 (tiga) instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bali dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. Analisis data sebagai komponen kuantitatif mempergunakan indikator rasio pendapatan daerah dan belanja daerah Indikator pengukuran pendapatan daerah mempergunakan indikator pertumbuhan pendapatan daerah, derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan daerah, kemandirian daerah, efisiensi pendapatan daerah dan efektifitas pendapatan daerah. Rumus perhitungan untuk masing – masing indikator pendapatan daerah yang dimuat oleh Mahmudi (2019) yaitu

- Pertumbuhan Pendapatan Daerah  

$$\frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100\%$$
- Derajat Desentralisasi Fiskal  

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- Kemandirian Daerah  

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer Pemerintah Pusat} + \text{Pembiayaan Daerah}} \times 100\%$$
- Ketergantungan Daerah  

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$
- Efektivitas Pendapatan Daerah  

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$
- Efisiensi Pendapatan Daerah  

$$\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah (Pengeluaran)}}{\text{Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian pengukuran belanja daerah mempergunakan perhitungan pertumbuhan belanja daerah, keserasian belanja operasional dan belanja modal terhadap total belanja dan efisiensi belanja daerah. Rumus perhitungan untuk masing – masing indikator belanja daerah yang dimuat oleh Mahmudi (2019) yaitu

- Pertumbuhan Belanja Daerah  

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100\%$$
- Keserasian Belanja Operasi  

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$
- Keserasian Belanja Modal  

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$
- Efektifitas Belanja Daerah  

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dalam aktivitas pengumpulan data kualitatif diperlukan untuk memperhatikan beberapa hal. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2016) menyebutkan bahwa aktivitas di dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga usai sehingga menghasilkan data yang jenuh. Aktivitas analisis data terdiri dari beberapa bagian yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion/drawing/verification*. Kemudian dilaksanakan uji kredibilitas terhadap hasil data yang ditemui. Uji Kredibilitas data sangat penting untuk dilakukan dikarenakan untuk menjamin keakuratan data. Keabsahan data memiliki tujuan agar melihat derajat kebenaran dan kepercayaan atas hasil penelitian dengan mempergunakan suatu standar tertentu.

Pengujian terhadap hasil daya yang diperoleh dalam penelitian ini dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah pengecekan atas pengujian kredibilitas atas data yang berasal dari berbagai sumber dengan berbagai sumber, cara, metode dan waktu. Dalam penelitian ini mempergunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan metode pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Proses triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui beberapa responden yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa sumber dan membandingkannya dengan hasil dokumen yang telah terpublikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Pertumbuhan Pendapatan**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif pendapatan daerah dengan indikator pertumbuhan pendapatan daerah dengan perhitungan rata – rata menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan besaran rata – rata setiap kabupaten dan kota mengalami kondisi yang berfluktuatif. Kabupaten Badung dengan capaian 6,28% untuk tiap tahunnya. Kabupaten Bangli dengan capaian 1,41% untuk tiap tahunnya. Kabupaten Buleleng dengan capaian 0,43 % untuk tiap tahunnya. Kabupaten Gianyar capaian tiap tahunnya sebesar 5,29 %. Kabupaten Jembrana dengan capaian rata – rata 0,23 %. Kabupaten Karangasem dengan capaian pertumbuhan pendapatan 1,46 % untuk tiap tahunnya. Kabupaten Klungkung capaian setiap tahunnya sebesar 2,04%. Kabupaten Tabanan capaian sebesar 0,03 % serta Kota Denpasar memperoleh rata – rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 1,51% untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan atas hasil tersebut masih dapat dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah. Narasumber dari

instansi BAPENDA Provinsi Bali menyebutkan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu

“Dengan melakukan intensifikasi dan eksensifikasi terkait pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah baik di tingkat kabupaten dan kota hingga Provinsi Bali“

Kemudian berdasarkan pendapat narasumber dari instansi BAPPEDA Provinsi Bali mengatakan bahwa hal yang dilakukan untuk menaikkan pendapatan daerah yaitu

“Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, alokasi transfer terutama alokasi DAK Fisik dan Upaya Tindak Lanjut UU No. 15 Tahun 2023 Terkait Kontribusi Wisatawan“.

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah untuk daerah kabupaten dan kota diharapkan strategi dan upaya yang dapat dilakukan dengan terlebih dahulu evaluasi karakteristik untuk masing – masing daerah sehingga kemudian dimungkinkan untuk menggali potensi – potensi sumber pendapatan baru

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Derajat Desentralisasi Fiskal**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif pendapatan daerah dengan indikator derajat desentralisasi fiskal secara keseluruhan menunjukkan hasil rerata dengan indikator kurang dalam penerapan derajat desentralisasi fiskal. Kabupaten Badung dengan capaian 75,2 % Kabupaten Bangli dengan capaian 11,49 % Kabupaten Buleleng dengan capaian sebesar 17,92 %. Kabupaten Gianyar dengan capaian sebesar 36,26% Kabupaten Jembrana dengan rata – rata pencapaian sebesar 13,40 %. Kabupaten Karangasem dengan rata – rata pencapaian sebesar 15,18 %. Kabupaten Klungkung dengan rata – rata pencapaian sebesar 19,77 %. Kabupaten Tabanan dengan rata – rata pencapaian sebesar 20,48 % dan Kota Denpasar dengan rata – rata pencapaian sebesar 43,08 % dengan perolehan dalam penerapan derajat desentralisasi.

Dengan capaian tersebut diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam penanggulangan penerapan derajat desentralisasi oleh pemerintahan daerah. Hasil wawancara bersama dengan narasumber dari BAPENDA Provinsi Bali mengungkapkan beberapa upaya strategis dalam upaya peningkatan PAD yaitu

“Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dengan cara update data pajak /retribusi dan mapping potensi pajak/retribusi daerah dan mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak seperti diskon pajak kendaraan bermotor”.

Hasil wawancara berikutnya oleh narasumber dari instansi BAPPEDA Provinsi Bali memberikan beberapa upaya dalam peningkatan PAD yaitu

“Mengembangkan pemanfaatan IT (Samsat Online, E-Samsat, Samsat QRIS, Samsat Ibu Jari dan Samsat VAST), pengembangan akses pelayanan samsat (samsat pembantu, gerai samsat, samsat *corner*, samsat keliling, samsat *drivethru*), pendekatan ke objek pajak untuk mengetahui objek pajak yang aktif/tidak aktif dengan kajian – kajian pengembangan potensi objek pajak”.

Pengembangan upaya peningkatan PAD tersebut dioptimalkan melalui pungutan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah terbesar sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Kemandirian Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif pendapatan daerah dengan indikator kemandirian daerah berdasarkan kepada hasil perhitungan kemandirian daerah menunjukkan hasil yang rata – rata tergolong dalam kategori rendah dalam penerapan kemandirian daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa rata – rata secara keseluruhan berada pada rentangan rendah dan sangat rendah. Kabupaten Badung dengan perolehan rerata 330,17 %. Kabupaten Bangli dengan rata – rata perolehan

14,85% . Kabupaten Buleleng dengan rata – rata pencapaian 26,65 %. Kabupaten Gianyar memperoleh hasil capaian sebesar 62,45 %. Kabupaten Jembrana dengan rata – rata pencapaian 17,07 %. Kabupaten Karangasem memperoleh capaian sebesar 20,22 %. Kabupaten Klungkung memperoleh hasil capaian sebesar 28,18 %. Kabupaten Tabanan memperoleh hasil capaian sebesar 30,85% Kota Denpasar memperoleh hasil 72,93 % sehingga tergolong dalam kategori sedang dalam penerapan kemandirian daerah.

Dikarenakan masing -masing banyak daerah belum mampu secara mandiri dalam kinerja keuangan maka dibutuhkan berapa hal dalam mendorong kemandirian daerah. Hasil wawancara bersama dengan narasumber dari BAPENDA Provinsi Bali mengungkapkan beberapa upaya dalam mendorong kemandirian daerah yaitu

“Membangun infrastruktur yang mengundang objek pajak/retribusi, peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung peningkatan PAD, meningkatkan dan mendorong investasi, peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD dan melakukan perhitungan yang akurat terhadap potensi pajak/retribusi”.

Kemudian dari hasil wawancara dari instansi BAPPEDA Provinsi Bali memberikan beberapa strategi yaitu

“Melalui Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta upaya peningkatan peran BUMD”.

Hal ini dikarenakan BUMD merupakan bagian dari badan usaha daerah dengan memberikan kontribusi terhadap PAD melalui deviden atau pajak.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Ketergantungan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif pendapatan daerah dengan indikator ketergantungan daerah berdasarkan kepada hasil perhitungan kemandirian daerah menunjukkan hasil rata – rata sangat tinggi dalam ketergantungan terhadap dana perimbangan pemerintah pusat. Kabupaten Badung memperoleh

rerata 16,23 % sehingga tergolong kategori yang rendah dan tidak terlalu tergantung terhadap dana perimbangan pemerintah pusat sementara daerah lainnya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Kabupaten Bangli dengan perolehan 61,89%. Kabupaten Buleleng dengan perolehan rerata 60,35%. Kabupaten Gianyar dengan perolehan rerata 58,39%. Kabupaten Jembrana dengan capaian sebesar 64,01%. Kabupaten Karangasem dengan capaian sebesar 65,44%. Kabupaten Klungkung dengan capaian sebesar 65,67 tergolong dalam kategori sangat tinggi dalam ketergantungan terhadap dana perimbangan. Kabupaten Tabanan dengan rerata capaian sebesar 65,67% dan Kota Denpasar dengan perolehan rata – rata sebesar 51,74% dalam ketergantungan keuangan daerah.

Mengingat hasil perhitungan pemerintah daerah kabupaten dan kota menunjukkan hasil perhitungan dalam kategori tinggi terhadap dana perimbangan maka diperlukan beberapa upaya untuk menekan nilai ketergantungan daerah tersebut. Narasumber dari BAPENDA Provinsi Bali mengungkapkan beberapa upaya dalam menurunkan angka ketergantungan yaitu dengan.

“Melakukan peningkatan kemampuan inventarisasi potensi yang ada di daerah, menggali potensi Pendapatan daerah yang ada dan meningkatkan SDM Pengelola Pendapatan, dimana diperlukan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam melahirkan regulasi perpajakan”.

Hal yang sama diuangkan oleh narasumber dari BAPPEDA Provinsi Bali agar melakukan beberapa hal yaitu

“Maka dilakukan untuk peningkatan PAD dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selain dari APBD Pembangunan bisa melalui pola Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)”.

Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha dimaksudkan sebagai bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam rangka pengadaan infrastruktur yang bermanfaat

kepada kepentingan umum output yang dihasilkan nantinya mengarah kepada pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Efektifitas Pendapatan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif pendapatan daerah dengan indikator efektifitas pendapatan daerah berdasarkan kepada hasil perhitungan menunjukkan hasil yang rata – rata tergolong dalam cukup efektif dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Badung memperoleh hasil capaian sebesar 90,07 %. Kabupaten Bangli dengan hasil capaian 97,83 %. Kabupaten Buleleng dengan hasil capaian sebesar 98,19%. Kabupaten Gianyar memperoleh hasil capaian sebesar 85,28%. Kabupaten Jembrana dengan hasil capaian sebesar 10,86 %. Kabupaten Karangasem dengan capaian sebesar 94,50%. Kabupaten Klungkung dengan capaian sebesar 114,76%. Kabupaten Tabanan dengan capaian sebesar 96,35% dan Kota Denpasar dengan capaian sebesar 111,80% dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan anggaran awal yang telah ditetapkan.

Mempertimbangkan atas hasil perhitungan tersebut diperlukan suatu upaya dalam untuk mengoptimalkan efektifitas dalam merealisasikan. Narasumber dari BAPENDA Provinsi Bali mengungkapkan upaya mengoptimalkan efektifitas pendapatan daerah yaitu.

“Mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah Intensifikasi dan ekstensifikasi”.

Namun, berdasarkan narasumber dari BAPPEDA Provinsi Bali menyebutkan upaya yang dapat dilakukan yaitu

“Melakukan evaluasi secara rutin, jika diperlukan akan dilakukan kebijakan pemutihan untuk mendorong wajib pajak menuntaskan kewajiban perpajakannya”.

Evaluasi atas perencanaan dan penganggaran sebagai bentuk pengawasan merupakan bagian dari desain pengawasan yang berkelanjutan. Evaluasi dilakukan berdasarkan dari

dokumen perencanaan APBD dalam tahun periode anggaran berjalan. Hal ini memiliki kebermanfaatan bagi tiap – tiap Pemda untuk melakukan pencegahan kecurangan dan potensi ketercapaian sasaran kegiatan pembangunan daerah.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Efisiensi Pendapatan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif pendapatan daerah dengan indikator efisiensi pendapatan daerah berdasarkan kepada hasil perhitungan menunjukkan hasil yang rata – rata tergolong dalam kategori efisien dalam realisasi pendapatan daerah. Kabupaten Badung memperoleh hasil sebesar 99,71%. Kabupaten Bangli memperoleh hasil sebesar 100,89%. Kabupaten Buleleng memperoleh hasil sebesar 99,18 %. Kabupaten Gianyar memperoleh hasil sebesar 106,36%. Kabupaten Jembrana memperoleh hasil pencapaian sebesar 99,66 %. Kabupaten Karangasem memperoleh hasil perhitungan sebesar 99,36 %. Kabupaten Karangasem memperoleh hasil sebesar 99,36%. Kabupaten Klungkung memperoleh hasil perhitungan sebesar 101,51%. Kabupaten Tabanan memperoleh hasil sebesar 101,17 % dan Kota Denpasar memperoleh hasil perhitungan sebesar 97,64%.

Berdasarkan kepada hasil perhitungan diatas keseluruhan kabupaten dan kota telah dinyatakan telah efisien dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kembali efisiensi pendapatan daerah. Menurut narasumber dari BAPENDA Provinsi Bali untuk mengoptimalkan pengeluaran biaya atas perolehan pendapatan menyebutkan upaya yang dapat dilakukan yaitu

“Adanya kinerja pengelolaan PAD yang efektif dan efisien dapat menekan biaya-biaya sehingga capaian menjadi maksimal dengan cara bekerja sama dengan Bank Persepsi (PT. Bank BPD Bali) sehingga pengelolaan sistem pengelolaan pajak daerah di fasilitasi oleh pihak Bank”.

Kemudian narasumber dari instansi BAPPEDA menyebutkan upaya yang dapat dilakukan yaitu

“Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan upaya efisiensi dilakukan mulai dari tahap perencanaan”.

Hal ini dilakukan agar terlaksanakannya kegiatan pemantauan dan penerimaan pajak daerah secara elektronik melalui bank persepsi.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Pertumbuhan Belanja Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif belanja daerah dengan indikator pertumbuhan belanja daerah dengan perhitungan rata – rata menunjukkan pertumbuhan secara keseluruhan positif dengan kondisi yang berfluktuatif. Kabupaten Badung kemampuan pertumbuhan belanja setiap tahunnya berada pada rata – rata 1,12 %. Kabupaten Bangli kemampuan pertumbuhan belanja tiap tahunnya berada pada rata – rata 2,71%. Kabupaten Buleleng pertumbuhan belanja tiap tahunnya berapa pada kisaran 0,74%. Kabupaten Gianyar kemampuan pertumbuhan belanja daerah berada pada rata – rata 3,13% untuk pertumbuhan belanja tiap tahunnya. Kabupaten Jembrana kemampuan pertumbuhan rata – rata belanja daerah 0,47% untuk tiap tahunnya. Kabupaten Karangasem dengan rata – rata pertumbuhan belanja daerah 1,31% untuk tiap tahunnya. Kabupaten Klungkung dengan pertumbuhan belanja daerah 2,34% untuk tiap tahunnya. Kabupaten Tabanan dengan kemampuan pertumbuhan belanja daerah sebesar 0,67% untuk setiap tahunnya. Kota Denpasar dengan rata – rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 1,69% untuk tiap tahunnya.

Kemudian optimalisasi belanja dapat dilakukan melalui beberapa hal. Menurut narasumber dari instansi BPKAD Provinsi Bali menyebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan yaitu

“Upaya yang dilakukan yaitu menyusun besaran alokasi belanja daerah sesuai dengan kebutuhan serta menyusun rencana aliran kas dari masing- belanja



tersebut secara cermat sehingga penyerapan belanja pada masing-masing periode (triwulan) berjalan secara optimal sesuai dengan yang ditargetkan". Kemudian narasumber dari BAPPEDA Provinsi Bali menyebutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan yaitu

"Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun – tahun sebelumnya, membatasi belanja penunjang dan mengoptimalkan biaya inti yang menyentuh pada masyarakat".

Pembentukan anggaran belanja daerah dengan berpedoman dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali untuk tahun yang bersangkutan dengan penetapan pola koordinasi *bottom – up* kemudian dievaluasi dan diturunkan melalui pola koordinasi *top – bottom* oleh pemerintah daerah kepada pemerintah masing – masing kabupaten dan kota.

#### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif belanja daerah dengan indikator keserasian belanja operasional dengan total belanja daerah hasil rata – rata perhitungan menunjukkan asersi serapan belanja yang positif. Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah keseluruhan kabupaten dan kota telah rata – rata secara keseluruhan diatas 60% dalam merealisasikan belanja operasi. Kabupaten Badung dengan rata – rata realisasi sebesar 70,79 %. Kabupaten Bangli dengan rata – rata realisasi sebesar 67,86%. Kabupaten Buleleng dengan rata – rata capaian sebesar 76,73%. Kabupaten Gianyar dengan rata – rata capaian sebesar 61,18%. Kabupaten Jembrana dengan rata – rata capaian sebesar 71,28%. Kabupaten Karangasem dengan rata – rata capaian sebesar 78,10 %. Kabupaten Tabanan dengan rata – rata capaian sebesar 74,75%. Kota Denpasar dengan rata – rata capaian sebesar 80,55% atas realisasi belanja modal dengan hasil perhitungan rata – rata realisasi tertinggi untuk seluruh kabupaten dan kota.

Dalam hasil perhitungan tersebut keseluruhan realisasi tidak melebihi dari besaran anggaran yang tersisa sehingga terdapat sisa dana yang perlu untuk dioptimalkan. Menurut narasumber dari BPKAD Provinsi Bali menjelaskan upaya yang dapat dilakukan yaitu

"Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan sisa dana dari belanja daerah yaitu memanfaatkan kembali sisa dana dimaksud sebagai sumber pendanaan untuk mendanai belanja prioritas melalui perubahan APBD atau pada APBD tahun anggaran berikutnya". Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh narasumber dari instansi BAPPEDA Provinsi Bali dengan menyebutkan

"Diarahkan Anggaran Silpa dirancang untuk penggunaannya pada perubahan RKPD/APBD sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan pada tahun anggaran tersebut, sisa belanja merupakan potensi untuk sumber pendanaan baru".

Sisa anggaran belanja akan dibentuk SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan untuk perhitungan tahun berkenaan harus bersaldo nihil dengan berdasarkan kepada peraturan daerah maka menghasilkan nilai SiLPA yang dapat dimanfaatkan. Apabila bernilai positif akan dikenakan dalam alokasi belanja lain sedangkan apabila negatif akan dilakukan penghapusan terhadap volume kegiatan yang telah dianggarkan.

#### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif belanja daerah dengan indikator keserasian belanja modal dengan total belanja daerah hasil rata – rata perhitungan menunjukkan asersi serapan belanja yang positif. Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah keseluruhan kabupaten dan kota telah rata – rata secara keseluruhan memperoleh hasil yang positif. Kabupaten Badung dengan rata – rata serapan belanja modal sebesar 13,72%. Kabupaten Bangli dengan rata – rata serapana belanja modal sebesar 14,99%. Kabupaten Buleleng dengan rata – rata serapan belanja modal sebesar 11,03%.

Kabupaten Gianyar dengan serapan belanja modal sebesar 18,59%. Kabupaten Jembrana dengan serapan belanja modal sebesar 16,29%. Kabupaten Karangasem dengan serapan belanja modal sebesar 9,78%. Kabupaten Klungkung dengan serapan belanja modal sebesar 10,88%. Kabupaten Tabanan dengan serapan belanja modal sebesar 11,96% dan Kota Denpasar dengan serapan belanja modal sebesar 9,72%.

Upaya optimalisasi belanja modal perlu untuk dilakukan mengingat belanja modal merupakan belanja yang lebih komprehensif dibandingkan dengan belanja operasi karena bersifat jangka menengah dan panjang. Menurut narasumber dari BPKAD Provinsi Bali menyebutkan optimalisasi belanja modal sebagai bentuk investasi daerah yaitu.

“Sesuai dengan amanat UU HKPD, pengalokasian belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang baik tentunya akan menjadi investasi yang sangat berharga tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga pada sisi SDM di daerah tersebut”.

Kemudian dipaparkan oleh narasumber dari instansi BAPPEDA Provinsi Bali bahwa optimalisasi alokasi belanja modal yaitu.

“Belanja Modal dirancang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah), Belanja Modal diutamakan karena akan menjadi asset. Belanja modal ditingkatkan dengan menekan belanja – belanja penunjang”.

Manajemen terhadap belanja modal tersebut diharuskan lebih komprehensif karena akan diutamakan menjadi asset dengan keseluruhan belanja modal harus diperhatikan berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Penganggaran terhadap belanja modal sebagai asset tetap dilakukan sebesar harga perolehan atas barang tersebut dengan pengadaan barang tersebut harus memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi asset tetap yang diatur dalam Pergub atau Perda. Kemudian untuk

belanja modal asset lainnya harus dilaporkan dengan pos akun berbeda dengan memenuhi beberapa kriteria tertentu.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Efisiensi Belanja Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif belanja daerah dengan indikator efisiensi belanja daerah hasil rata – rata perhitungan menunjukkan rata – rata realisasi efisien dalam realisasi belanja daerah. Analisis efisiensi belanja daerah keseluruhan kabupaten dan kota telah rata – rata secara keseluruhan memperoleh hasil dalam kategori efisien dalam merealisasikan belanja daerah. Kabupaten Badung dengan rata – rata perolehan sebesar 83,31 %. Kabupaten Bangli dengan rata – rata perolehan sebesar 90,21%. Kabupaten Buleleng dengan rata – rata perolehan sebesar 93,20%. Kabupaten Gianyar dengan rata – rata perolehan sebesar 84,11%. Kabupaten Jembrana dengan rata – rata perolehan sebesar 95,64%. Kabupaten Karangasem dengan rata – rata perolehan sebesar 93,00 % Kabupaten Klungkung dengan rata – rata perolehan sebesar 89,08%. Kabupaten Tabanan tergolong dengan perolehan sebesar 90,17% dan Kota Denpasar dengan rata – rata pencapaian sebesar 91,91% dalam realisasi belanja daerah.

Menimbang hasil perhitungan tersebut bahwa pemerintah memerlukan upaya untuk mengefisiensi keseluruhan belanja daerah agar realisasi sesuai dengan besaran anggaran belanja yang telah ditetapkan. Menurut narasumber dari BPKAD Provinsi Bali menyebutkan hal yang dapat dilakukan yaitu

“Upaya yang dilakukan yaitu menyusun belanja secara cermat sesuai dengan kebutuhan riil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan melalui proses tahapan perencanaan mulai dari forum konsultasi publik, forum SKPD serta musrenbang yang mengikutsertakan seluruh stakeholder”. Kemudian narasumber dari BAPPEDA Provinsi Bali memaparkan bahwa

“Upaya efisiensi harus telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, upaya seperti Verifikasi Renja, Verifikasi RKA dan dorongan arahan pimpinan untuk mewujudkan penganggaran yang efisien merupakan salah satu hal penting untuk mendorong perangkat daerah untuk menuju anggaran yang efektif dan efisien”

Upaya efisiensi belanja daerah tersebut dilakukan dari proses perencanaan dengan melakukan verifikasi dokumen yang menggambarkan rencana keseluruhan tentang belanja daerah. Proses penyusunan anggaran dengan penentuan besaran alokasi bagi setiap satuan kerja perangkat daerah harus berdasarkan kepada pemenuhan kinerja pelayanan publik untuk setiap urusan pemerintah dengan dimaksudkan untuk tidak dilakukan pemerataan antar perangkat daerah dengan mempertimbangkan besaran alokasi tahun sebelumnya. Hal ini sebagai upaya memfokuskan atas sasaran utama pelayanan publik dengan perangkat daerah menganggarkan beberapa program dan beberapa kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas guna mewujudkan pembangunan daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Bali untuk tahun anggaran 2017 – 2022 berdasarkan perspektif pendapatan daerah dengan hasil perindikator menunjukkan hasil yang beragam. Bahwa indikator pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Penerapan derajat desentralisasi fiskal secara keseluruhan menunjukkan hasil dalam kategori kurang. Kemandirian daerah menunjukkan hasil yang rata – rata tergolong dalam kategori rendah. Ketergantungan daerah

berdasarkan kepada hasil perhitungan kemandirian daerah menunjukkan hasil rata – rata sangat tinggi. Efektivitas pendapatan daerah berdasarkan kepada hasil perhitungan menunjukkan hasil yang rata – rata tergolong dalam cukup efektif dan indikator efisiensi pendapatan daerah berdasarkan kepada hasil perhitungan menunjukkan hasil yang rata – rata tergolong dalam kategori efisien dalam realisasi pendapatan daerah.

2. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Bali untuk tahun anggaran 2017 – 2022 berdasarkan perspektif belanja daerah dengan hasil perindikator menunjukkan hasil yang beragam. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota berdasarkan perspektif belanja daerah dengan indikator pertumbuhan belanja daerah dengan perhitungan rata – rata menunjukkan pertumbuhan secara keseluruhan positif dengan kondisi yang berfluktuatif. Berdasarkan perspektif belanja daerah dengan indikator keserasian belanja operasional dan belanja modal dengan total belanja daerah hasil rata – rata perhitungan menunjukkan asersi serapan belanja yang positif. Kemudian berdasarkan indikator efisiensi belanja daerah hasil rata – rata perhitungan menunjukkan rata – rata realisasi efisien dalam realisasi belanja daerah.

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik saran dalam penelitian yaitu

1. Upaya peningkatan kinerja keuangan berdasarkan perspektif pendapatan daerah yaitu pemerintah daerah masih diharuskan untuk meningkatkan upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa hal yang dapat diupayakan dalam peningkatan PAD yaitu dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang

kemudian mengundang objek pajak dan retribusi, mendorong angka partisipasi masyarakat guna mendukung peningkatan PAD seperti melakukan ekstensifikasi pajak maupun intensifikasi pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kemampuan perpajakannya, mengupayakan dan meningkatkan kemampuan daerah untuk menerapkan investasi, melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pengelolaan PAD dan melakukan peningkatan kemampuan inventarisasi potensi – potensi yang ada di wilayah masing – masing.

2. Upaya optimalisasi belanja daerah dilakukan dengan penyusunan anggaran belanja prioritas berdasarkan atas kebutuhan dari periode yang bersangkutan. Kemudian mempertimbangkan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja tahun sebelumnya sebagai bentuk efektivitas dan efisiensi pengelola anggaran sehingga sisa realisasi anggaran belanja tidak hanya diarahkan ke SiLPA melainkan dapat dioptimalkan dalam periode berkenaan menjadi program yang secara langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Fakultas Ekonomi dan Dosen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha telah membantu memfasilitasi penelitian ini hingga dapat diterbitkan artikel publikasi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bali dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dan beserta staf jajarannya yang telah bersedia membantu penelitian ini. Kemudian rasa terima kasih kepada orang tua dan dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta arahan

sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif baik di bidang akademis maupun di bidang pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Pusat. (2014). Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM.
- Pemerintah Pusat. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. LN. 2010 No. 123, TLN No. 5165, LL SETNEG : 7 HLM.
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(2), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nurul Amin. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, 4:1, 80–91.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (P. Alfabeta, Ed.; Cetakan ke). Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. In Mardiasmo (Ed.), *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi ke 4). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Saputra, S. C., Suwendra, W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2014. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2).
- Indah, I., Dan, S., & Yousida, I. (2019). JIEB : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *JIEB : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 129–142. <http://ejurnal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In UPP STIM YKPN (Ed.), Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik (Edisi Keempat).
- Maulina, F. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat).
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63.
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 43–60.  
<https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4619>
- Pemerintah Pusat. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. BN.2020/No.888, Kemendagri.Go.Id : 6 Hlm.
- Oktarini Khamilah Siregar, & Fitri Yani Panggabean. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11, 27–37.
- Sari, I., Asaari, M., Sefty, I., & Hidayah, N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas*, 4(1), 408–425.
- Ghina Shinta Wulaning Asri. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 61–78.
- Muhammad Ichlasul Amal, & Puji Wibowo. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93.
- Vebiani, D., & Dian Hardiana, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). In *Journal of finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* (Vol. 1, Issue 1).
- Zarkasyi Rahman, A., & Lintang Saputra, F. (2022). Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v22i2>
- Natalia Padang, N., & Suprpto Padang, W. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2).  
[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Nur, S., Asiku, H., Boku, Z., & Panigoro, N. (2023). Jurnal Mirai Management Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 64–75.
- Putu, N., Putri, A. S., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14, 2338–6177.  
<https://doi.org/10.23887/jipppg.v3i2>
- Muhammad Hamdan Sayadi, Muhammad Bahrul Ulum, & Rafika Sari. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–6.
- Puspita Geatri Br Perangin-Angin, Erisma Adi Natalian, & Risma Wira Bharata. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1, 173–183.